BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang tentunya memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Demi mencapai semua itu, diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendistribusian pendapatan yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik merupakan sesuatu yang harus dicapai oleh setiap negara. Metode dan indikator yang digunakan oleh setiap negara pun berbeda-beda sehingga hasil yang diperoleh mampu mewakili perubahan perekonomian yang terjadi di negara tersebut, yang pada akhirnya setiap elemen pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan akan diketahui pengaruhnya terhadap perubahan ekonomi.

Perbandingan pendapatan perkapita antar negara telah memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kemakmuran negara maju dengan negara berkembang. Pendapatan perkapita dapat dihitung dari Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Salah satu indikator suatu negara dapat dikatakan makmur adalah pendapatan perkapitanya tinggi. Mengenai hal ini, Bank Dunia telah mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita

Hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi topik perdebatan para ekonom sejak tahun 1970-an. Perbedaan pendapat banyak terjadi terutama akibat perbedaan aspek empiris.

Sebagian kalangan ekonom menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh yang berarti dari perkembangan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa peranan perkembangan sektor keuangan (*financial development*) berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dan jika terhambat, maka akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu kebijakan pemerintah seharusnya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sistem finansial.

Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar terjadi hampir di semua negara. Sebagaimana ditulis Karimi (2013), memasuki abad 21, 20% penduduk dunia yang hidup di negara maju menikmati 86% penghasilan dunia. Sedangkan 20% paling bawah hanya menikmati 1% penghasilan dunia. Tingkat pendapatan orang kaya dan orang miskin juga makin melebar. Pada tahun 1960, sebanyak 20% penduduk paling kaya dunia berpenghasilan 30 kali lebih tinggi dari 20% penduduk paling bawah. Kesenjangan makin lebar dari tahun ke tahun: 32 kali pada tahun 1970, 45 kali pada tahun 1980, 60 kali pada tahun 1990, dan 75 kali pada akhir abad ke-20.

Islam sangat menentang kondisi tersebut, karena sesungguhnya Islam mempunyai tujuan untuk lebih mementingkan kepentingan pemerataan distribusi pendapatan. Sehingga perlu adanya penanaman nilai-nilai ekonomi Islam dalam diri setiap muslim. Dalam ilmu ekonomi , tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi bukan Islam. Karena pada hakikatnya ilmu ekonomi mempunyai tujuan untuk mencari hasil yang sebanyak-banyaknya dengan biaya dan modal yang sedikit-sedikitnya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur’an:

أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةٗ وَبَاطِنَةٗۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ٢٠

[سورة لقمان,٢٠]

Artinya : "Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan" (QS Luqman: 20).

Namun, dalam ekonomi Islam dalam pencapaian hasil tersebut harus dikaitkan dengan tanggung jawab pribadi, sosial, dan sesuai dengan tuntunan syariah. Berbeda dengan ekonomi bukan Islam tanpa memperhatikan tuntunan syariah Islam. Sebagian ulama dan ahli ekonomi muslim berpendapat bahwa *interest* atau bunga adalah haram, karena dipandang sebagai riba yang dilarang oleh Allah SWT, sebagiamana dalam ayat Al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ١٣١ [سورة آل عمران,١٣٠-١٣١]

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (QS Al-Imran: 130-131).

Dengan demikian ekonomi Islam mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan ekonomi bukan Islam. Karena dalam ekonomi Islam harus menganjurkan cara bagaimana berperilaku ekonomi yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Berbagai negara di dunia banyak negara Islam yang sudah menerapkan sistem ekonominya yang sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu seperti negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI. Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah organisasi internasional yang di permulaan didirikannya lebih banyak menekankan masalah politik, terutama Palestina. Namun, OKI kemudian menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia. Oleh karena itu, negara yang tergabung dalam organisasi OKI dapat di asosiasikan sebagai negara Islam. Pemerintah negara-negara muslim yaitu negara dengan konstitusional Islam atau mayoritas penduduk beragama Islam di dunia tentunya memiliki tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Dapat dilihat dari komitmen negara-negara muslim tersebut dengan menandatangai Deklarasi Milenium pada September 2000 dalam rangka mencapai tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs) dimana manusia ditempatkan sebagai fokus utama. Sehingga MDGs mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara negara yang masih mempunyai tingkat kesejateraan yang rendah dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Upaya mensejahterakan masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Namun, kenyataannya peran dan fungsi pemerintah

cenderung terhambat oleh banyak faktor. Di satu sisi yaitu pengelolaan distribusi pendapatannya, nampak bahwa kecenderungan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak rakyat sangat terbuka.terlihat juga neraca keuangan mayoritas negara-negara muslim adalah dalam keadaan defisit. Hal ini menunjukkan buruknya pengelolaan anggaran di negara-negara muslim. Dengan potensi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sumber-sumber keuangan yang sangat besar, negara muslim semestinya sanggup untuk membangun kekuatan ekonominya demi kebaikan umat. Negara-negara muslim ini seharusnya mampu mengembalikan prinsip dan misi Islam sesungguhnya, yaitu memerangi kemiskinan. Begitu banyak firman Allah dalam Al Qur'an dan di dalam Hadits yang menjelaskan betapa Islam menentang keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Seharusnya sebagai umat Islam berkeyakinan bahwa dengan diamalkannya ajaran Islam secara konsisten dan benar akan mempercepat proses modernisasi dan kesejahteraan masyarakat Islam.

Ketimpangan pendapatan di negara-negara Islam juga mengalami peningkatan, dalam penelitian Muttaqin (2013), hasil kajian menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi di antara negara-negara Islam semakin meningkat ditinjau dari sisi kelompok pendapatan. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini untuk menunjukkan ketimpangan ekonomi di negara Islam.

Tabel 1
Proporsi Ekonomi Negara Islam Menurut Kelompok Pendapatan, 2011

Kelompok Pendapatan	Jumlah Negara	Penduduk (jutajiwa)	PDB Harga Berlaku ($ milyar)	Pendapatan Perkapita ($)	Proporsi (%)	
					Penduduk	GDP
High Income	7	46.45	1,465.87	31,560.34	2.92	24.45
Low Income	18	361.28	231.19	657.98	22.75	3.86
Lower Middle Income	16	869.80	1,907.35	2,204.97	54.77	31.82
Upper Middle Income	16	310.55	2,389.94	7,850.00	19.56	39.87
Seluruh Negara Islam	57	1,588.07	5,994.34	3,824.66	100	100

Pada Tabel 1 terlihat ketimpangan ekonomi antar negara-negara Islam sangat besar khususnya antara negara-negara Islam yang terkategori kelompok berpendapatan tinggi (*High Income*) dengan kelompok yang berpendapatan rendah (*Low Income*). Dari USD 5.994,34 milyar nilai seluruh *output* ekonomi negara-negara Islam, proporsi output ekonomi kelompok berpendapatan tinggi berbanding 24,45% dengan 3,86% dari kelompok berpendapatan rendah atau mencapai 6,3 kali lipat. Padahal proporsi penduduk kelompok berpendapatan rendah lebih besar 7,8 kali proporsi kelompok berpendapatan tinggi. Perbedaan tersebut menggambarkan ukuran yang sangat tidak proporsional atau terjadi ketimpangan yang sangat tinggi.

Oleh karenanya, dalam hal ini akan di teliti secara empiris hubungan antara faktor makroekonomi dan perkembangan keuangan dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di negara Islam.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah faktor makroekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di negara Islam?

a. Apakah faktor perkembangan keuangan Islam berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di negara Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris:

1. Pengaruh faktor makroekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada negara Islam.
2. Pengaruh faktor perkembangan keuangan Islam terhadap distribusi ketimpangan pendapatan pada negara Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai guna secara:

1. Teoritis:
   a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana menambah khasanah keilmuan khusunya pengetahuan secara empiris perkembangan keuangan
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong civitas akademika lain untuk melakukan penelitian sejenis lebih lanjut agar lebih menyempurnakan pokok materi yang di uji.
   c. Penelitian dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian lain.
2. Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pertimbangan lembaga pemerintah yang terkait dalam melakukan kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan

Pcnulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut. BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : Kajian Pustaka, bab kedua berisikan teori-teori yang relevan untuk digunakan sebagai landasan penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah pada rumusan masalah. Selain itu juga terdapat beberapa tulisan dan publikasi berupa jurnal penelitian maupun artikel ekonomi yang relevan yang digunakan sebagai tambahan literatur untuk pengembangan penelitian ini. BAB III : Metode Penelitian, bab ini memaparkan tentang metode penelitian meliputi populasi dan sampel penelitian, sumber dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, dan metode analisis data. BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang deskripsi dan analisis hasil olah data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. BAB V : Kesimpulan, Implikasi dan Saran, bab ini merupakan bab terakhir dari rangakaian isi tesis. Dimana memuat kesimpulan, implikasi dan saran. Dimana pada bab ini, peneliti memaparkan ringkasan hasil pembahasan dan analisis masalah serta implikasi-implikasi temuan yang diperoleh dari penelitian. Selain itu peneliti juga menyertakan kekurangan akan penelitian yang dilakukan berupa saran-saran dan masukan agar penelitian serupa dikemudian hari dapat dikembangkan lebih baik.